

**LITERATUR REVIEW: REFORMASI ANGGARAN DAERAH
DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH**

Faidal Fuat
210221100155@student.trunojoyo.ac.id
Universitas Trunojoyo Madura

Mohamad Djasuli
djasuli@trunojoyo.ac.id
Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT

This literature study was carried out with the aim of knowing the implementation and analyzing budget and financial accounting reforms in regional government. This research uses a literature review or what is also known as a literature review. Based on the results of research conducted on the Google Scholar site, 15 articles were determined that met the criteria determined by researchers from a total review of 15,400 articles published on the Google Scholar site in the 2014-2024 period. The findings obtained from the results of the literature review are that in this post-reform era, regional budget management is required to be transparent and accountable. The financial accounting system during the reform period applies the accrual principle which is expected to produce specific, complete and informative descriptions of regional government financial reporting.

Keywords: Budget Reform, Financial Accounting Reform, APBD

1. PENDAHULUAN

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diresmikan sejak tahun 1945. Sejak berdirinya Negara Indonesia, sudah tertulis jelas dalam Undang-undang Dasar 1945 dimana tugas Negara Indonesia yaitu memberikan dan menjamin kehidupan warga negara yang aman, nyaman, serta tenteram. Dengan demikian, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi keamanan warga negaranya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tugas negara yang kedua yakni kesejahteraan warga negara Indonesia harus bisa dijamin oleh negara. Selanjutnya, kecerdasan warga negara harus dijamin oleh negara dan sudah menjadi kewajiban negara untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dunia. Dengan demikian, warga negara Indonesia dapat melaksanakan kegiatan keseharian dengan aman dan tenteram. Pada dasarnya, negara wajib meningkatkan kesejahteraan

masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai tujuan negara yang mulia, diperlukan perangkat dan sarana prasarana yang mampu menjadi pedoman pelaksanaan kehidupan bernegara termasuk dalam sistem keuangan negara (Priharjanto & Hadiwibowo, 2021).

Sejak Indonesia resmi sebagai negara merdeka, telah ditetapkan dalam perundangan penyelenggaraan administrasi negara, otonomi daerah menjadi hal yang krusial untuk diterapkan. Namun pada penerapannya, terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh sistem yang telah ditentukan sehingga menyebabkan terganggunya siklus Hukum Administrasi Publik. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap implementasi Otonomi Daerah baik secara langsung maupun tidak (Setiawan, 2020)

Sebagai akibat dari adanya kendala yang dialami, sehingga melahirkan reformasi guna peningkatan kualitas aturan di Indonesia tentunya termasuk sistem

keuangan. Pada era reformasi, banyak peluang yang diberikan terhadap perubahan dan pertumbuhan pembangunan negara guna tercapainya pembangunan yang merata, adil, dan seimbang. Reformasi ini dicerminkan dalam kebijakan otonomi daerah serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah tercantum dalam peraturan undang-undang pemerintahan daerah serta undang-undang yang mengatur terkait keseimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah (Noviastuti, 2007).

Langkah strategis yang dilakukan guna pengimplementasian kebijakan otonomi daerah serta desentralisasi yang bersifat luas, nyata, dan juga bertanggung jawab dapat digambarkan dalam dua hal yaitu yang pertama otonomi daerah dan desentralisasi merupakan solusi dari permasalahan internal negara seperti disintegrasi bangsa, pembangunan yang tidak merata, tingkat kemiskinan, kualitas hidup dan pembangunan warga negara yang rendah. Langkah kedua yaitu otonomi daerah dan desentralisasi merupakan acuan bagi negara Indonesia untuk beradaptasi di era globalisasi dengan memperkuat fondasi perekonomian melalui keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, hal yang paling krusial untuk diperhatikan adalah akuntabilitas dan transparansi publik. Dengan demikian, sistem pengelolaan anggaran publik perlu diperhatikan secara baik guna kemajuan negara (Jayanti, 2014).

Pada dasarnya, dalam upaya mewujudkan prinsip good government

diperlukan pengimplementasian otonomi daerah yang berkualitas. Salah satu sistem otonomi daerah di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang menyatakan penyerahan otonomi yang memberikan perhatian utama terhadap penguatan pemerintahan kabupaten dan kota. Hal tersebut dikarenakan kabupaten dan kota merupakan pusat pemegang urusan yang utama seperti hal yang berkaitan dengan moneter, pertahanan, serta keamanan, hukum, agama, moneter, dan segala hal yang diserahkan wewenanganya kepada pemerintahan daerah (Setiawan, 2020).

Reformasi anggaran daerah mencakup struktur anggaran yang berubah dan proses penyusunan APBD yang turut berubah. Perubahan tersebut dilakukan guna mengubah struktur anggaran yang bersifat kuno yang berbentuk line item dan incrementalism. Sistem ini termuat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1975 mengenai Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat pula aturan lain yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan anggaran daerah seperti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 mengenai Pengurusan Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 mengenai Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Keuangan, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Noviastuti, 2007).

Reformasi yang dilakukan tidak lain demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik yang meningkat. Dari latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa reformasi yang terjadi dalam anggaran daerah dan akuntansi keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan yang positif. Oleh karena itu, studi literatur ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi dan menganalisis reformasi anggaran dan akuntansi keuangan dalam pemerintahan daerah.

2. KERANGKA TEORITIS

Reformasi Anggaran Daerah

Pengelolaan keuangan berbasis publik pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek yang meliputi aspek penganggaran, akuntansi, pengendalian, dan audit. Pada umumnya, perbedaan dari aspek penganggaran dan aspek akuntansi yaitu konsep penganggaran ialah mengatur dan mengantisipasi hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pembelanjaan. Apabila aspek akuntansi berkaitan dengan kegiatan mencatat, mengolah, dan melaporkan segala bentuk penerimaan serta pengeluaran anggaran. Aspek ini keduanya merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan dalam keuangan sektor publik (Noviastuti, 2007).

Reformasi anggaran memiliki ruang lingkup yaitu struktur anggaran serta proses penyusunan APBD yang mengalami perubahan. Perubahan struktur anggaran ini dilakukan dengan tujuan sebagai peningkatan akuntabilitas dan transparansi publik. Adanya struktur anggaran yang baru diharapkan dapat berdampak terhadap penggambaran

surplus serta defisit anggaran dengan jelas. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat memberikan solusi strategi jika mengalami defisit fiskal. Dengan adanya reformasi anggaran dapat menciptakan format APBD yang lebih mudah dalam pembuatan perhitungan dana perimbangan yang tentunya menjadi bagian dari otonomi daerah. Dengan demikian, publik akan lebih mudah untuk melakukan analisis, evaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan APBD. Manfaat reformasi ini juga dirasakan oleh pemerintah seperti persiapan dana cadangan supaya dana yang disediakan tidak digunakan sepenuhnya dalam periode satu tahun anggaran (Noviastuti, 2007).

Terjadinya reformasi anggaran berkaitan dengan perubahan sistem sumber pembiayaan pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya adalah sumber penerimaan dana daerah. Reformasi anggaran daerah memiliki beberapa dimensi yang meliputi: reformasi kewenangan daerah dalam wewenangnyanya terhadap dana perimbangan keuangan, reformasi dalam prinsip kelola anggaran, reformasi prinsip dalam pemanfaatan dan peminjaman serta defisit spending, reformasi pembiayaan dalam hal strategi yang digunakan (Larasati, 2015). Setiap bentuk reformasi yang dilakukan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem yang transparan sesuai prinsip value for money sehingga akuntabilitas publik dapat dicapai.

Reformasi Akuntansi Keuangan Daerah

Setelah reformasi di implementasikan, tentunya akan

terjadi perubahan dalam pengelolaan APBD, sebagai contoh yaitu terciptanya sistem akuntansi keuangan daerah yang menggeser peran sistem pembukuan tunggal yang telah diimplementasikan selama pra-reformasi. Sistem akuntansi keuangan dalam masa reformasi menerapkan prinsip akrual yang diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang spesifik, lengkap, informatif terkait pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang telah mengalami reformasi juga mampu memberikan peluang bagi semua lapisan untuk mengevaluasi hasil kinerja pemerintah. Hal ini diterapkan guna meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan warga negara (Kaligis et al., 2020).

Undang-undang serta peraturan telah dibuat dan menyatakan karakteristik pengelolaan keuangan di era reformasi sebagai berikut (RI, 2020):

- a. Provinsi serta kota/kabupaten merupakan daerah.
- b. Kepala daerah serta perangkatnya yang dimaksud sebagai Pemerintah Daerah. DPRD dan Pemda terdapat pemisahan.
- c. Pertanggungjawaban kepala daerah menjadi satu kesatuan bersama perhitungan APBD.
- d. Beberapa poin yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban akhir tahun ialah laporan perhitungan dan nota

APBD, laporan arus kas, serta neraca daerah.

Adapun data pelengkap penilaian kinerja yang menggunakan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan yang meliputi (RI, 2020):

- e. Pinjaman APBD termasuk kepada akun Penerimaan (karena belum tentu hak dari pemda) dengan kata lain sudah bukan lagi masuk ke dalam akun Pendapatan (termasuk hak dari pemda).
- f. Unsur-unsur dalam penyusunan APBD selain kepala daerah dan DPRD adalah masyarakat.
- g. Kinerja PEMDA dinilai berdasarkan: perbandingan dari anggaran dan realisasinya, perbandingan standar biaya dengan realisasinya, persentase fisik serta target, dan tingkat pelayanan yang sesuai harapan.
- h. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun merupakan laporan perhitungan APBD yang dibahas oleh DPRD. Di dalamnya terdapat konsekuensi dari masa jabatan kepala daerah jika dua kali mengalami penolakan dari DPRD.
- i. Pengelolaan keuangan daerah mengikutsertakan penerapan akuntansi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan atau yang dikenal

pula dengan sebutan literatur review. Literatur review ialah suatu metode penulisan secara terperinci, spesifik, dan mudah direpresentasikan dalam menganalisis hasil penelitian atau pemikiran yang telah dilakukan oleh peneliti atau praktisi terdahulu. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menggabungkan informasi serta pengetahuan yang ada sesuai topik permasalahan yang sedang diteliti guna mencari titik pembaruan untuk penelitian selanjutnya. Lebih lanjut, metode ini dilakukan untuk membantu mengetahui teori dasar guna penelitian yang sedang dilakukan, menganalisis keterbatasan dan perluasan penelitian yang telah ada mengenai topik yang dibahas, membantu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Ulhaq, 2018). Penelitian ini dilakukan terhadap hasil penelitian terkait reformasi anggaran dan akuntansi keuangan

pemerintahan daerah yang telah dilakukan dan dipublikasikan dalam kurun waktu 2014 hingga 2024.

Kata kunci yang digunakan dalam penelitian ini adalah “reformasi anggaran”, “reformasi akuntansi”, “anggaran dan akuntansi keuangan daerah”. Artikel yang peneliti pilih ialah artikel yang sesuai dengan kriteria yaitu jurnal terbitan 10 tahun terakhir, artikel penelitian yang telah dilakukan, tersedia dalam bentuk full text. Pencarian artikel dilakukan di website Google Scholar.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui situs Google Scholar, ditentukan sebanyak 15 artikel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti dari total pengkajian 15.400 artikel terpublikasi di situs Google Scholar di kurun waktu 2014-2024. Hasil analisis yang telah dilakukan terhadap sumber yang telah ditemukan sebagai berikut:

TABEL ANALISIS PENELITIAN TERDAHULU: BERDASARKAN HASIL STUDI LITERATUR

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Temuan	Implikasi
Berlinda Ayu Adeti & Charis Christiani (2022)	Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah	Mengetahui pentingnya reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah serta reformasi pelayanan publik dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.	Analisis kualitatif deskriptif.	Pengimplementasian reformasi mampu memperkuat pemerintahan di daerah, meredefinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya, mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.	Dengan adanya reformasi dengan prinsip fleksibel, adaptif, sinergi mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat meningkatkan kapasitas daerah.
Andi Djalante	Konstruksi Implementas	Menganalisis fakta-fakta	Kualitatif deskriptif.	Implementasi kebijakan	Pada pengimplementasian

(2022)	i Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Pasca Reformasi Pemerintahan : Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone	konkret mengenai implementasi kebijakan manajemen keuangan oleh pemerintah Kabupaten Bone pada awal-awal upaya melakukan reformasi dalam bidang pemerintahan.		manajemen keuangan daerah pasca reformasi masih menemui banyak masalah di samping memerlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.	reformasi anggaran daerah dibutuhkan sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan komitmen organisasi yang memadai agar terciptanya visi reformasi.
Theresia Dian Widyastuti (2022)	Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Menganalisis peran reformasi terhadap dampak praktik tindak lanjut rekomendasi audit yang dilakukan pemerintah daerah dalam memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.	Kuantitatif .	Di era reformasi masih terdapat kelemahan pada pengendalian pemerintahan daerah.	Pada era reformasi sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan komitmen organisasi merupakan hal yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan yang bersifat transparan, berkualitas, dan akuntabel dapat diwujudkan.
Angelina Putu Winda Savira & Indrawati Yuhertina (2021)	Kesiapan dan Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam Rangka Reformasi Akuntansi dan Penerapan PP No.71 Tahun 2010: Berdasarkan Tinjauan Literatur	Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kesiapan dan keberhasilan penerapan sistem akuntansi pemerintahan di era reformasi.	Tinjauan literatur.	Hal-hal yang berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ialah sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan komitmen organisasi.	Pada era reformasi sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan komitmen organisasi merupakan hal yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan yang bersifat transparan, berkualitas, dan akuntabel dapat diwujudkan.
Sherly Alifah Citrayanti & Indrawati Yuhertiana (2021)	Telaah Reformasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Perspektif Luder <i>Contingency Model</i>	Melakukan analisis reformasi akuntansi sektor publik yang terdapat di Indonesia dengan menggunakan perspektif Luder <i>Contingency Model</i> .	Studi Literatur.	Dengan adanya reformasi di bidang terkait, mampu membawa Indonesia memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan pendekatan teori Luder <i>Contingency Model</i> bertumpu pada empat asumsi	Pengimplementasian reformasi akuntansi dengan berbagai pendekatan pada dasarnya ditujukan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan Indonesia.

				proses inovasi sektor publik yaitu rangsangan, variabel struktural sosial dari pengguna informasi, karakteristik Administrasi politik/penyedia informasi dan hambatan implementasi.	
Muhammad Gustavo Puluala (2021)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga)	Untuk mengetahui pengaruh dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kualitas SDM, pengadaan barang dan jasa terhadap tingkat penyerapan anggaran daerah.	Sensus dan statistik deskriptif.	Perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran daerah. Sedangkan variabel pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran daerah.	Pada era reformasi sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan komitmen organisasi merupakan hal yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan yang bersifat transparan, berkualitas, dan akuntabel dapat diwujudkan.
Muh. Irfan Anwar, Imran Ismail, dan Said Saggaf (2020)	Sistem Tata Kelola Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone	Mengetahui gambaran sistem Tata Kelola Keuangan dan Aset pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan kendala yang dihadapi serta solusi pemecahannya.	Penelitian kualitatif.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan serta aset di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.	Adanya reformasi keuangan dan reformasi sektor publik karena dengan perubahan ini berdampak terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan daerah yang meningkat.
Gede Sandiasa & Putu Agustana (2018)	Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di	Untuk mengetahui pentingnya reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah serta reformasi pelayanan publik dalam perannya	Tinjauan literatur.	Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masih diperlukan suatu sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel,	Reformasi administrasi dan birokrasi daerah mampu mendorong pemerintah dan masyarakat lebih bersinergi guna meningkatkan kapasitas daerah di persaingan era saat ini dan mendatang.

	Daerah	meningkatkan kinerja pemerintah daerah.		adaptif, dan mampu mendorong peningkatan potensi daerah.	
Suryanto (2018)	Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia	Untuk mengetahui reformasi sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia.	Kualitatif deskriptif.	Reformasi sistem akuntansi pemerintahan berdampak pada terjadinya perubahan dalam basis pencatatan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual, teknik pembukuan tunggal menjadi pembukuan berpasangan, dan laporan keuangan yang dihasilkan.	Reformasi sistem akuntansi pada dasarnya dilakukan sebagai upaya perbaikan sistem yang ada agar mampu menghasilkan pemerintahan yang berkualitas.
Sri Maulidiah (2017)	Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai Wujud Reformasi Birokrasi di Daerah	Mengidentifikasi proses optimalisasi pengelolaan aset sebagai wujud reformasi birokrasi di daerah.	Tinjauan literatur.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bentuk upaya pengelolaan aset/barang milik daerah dilaksanakan secara menyeluruh dan dalam waktu yang bersamaan, karena berbagai bentuk upaya optimalisasi pengelolaan aset/barang milik daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.	Implementasi reformasi mengharuskan upaya pengelolaan aset milik daerah dilaksanakan secara menyeluruh dan bersamaan untuk mengoptimalkan tata kelola daerah.
Bambang Juanda & Dedy Heriwibowo (2016)	Konsolidasi Desentralisasi Fiskal Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas	Menjelaskan bagaimana bagaimana APBD berkualitas, menganalisis regulasi yang bermasalah, dan memberikan solusi perbaikan guna menciptakan alokasi pembelanjaan berkualitas.	Deskriptif kualitatif.	Mekanisme pembahasan APBD saat ini membuka peluang terjadinya distorsi prioritas daerah, alokasi belanja yang kurang tepat, penyusunan serta pengimplementasian APBD tidak sesuai waktu yang mengakibatkan belanja daerah kurang efektif dan efisien.	Agenda reformasi saat ini diharapkan belanja negara yang berkualitas dapat terwujud dengan cara memperkuat kemampuan daerah dalam menyusun, melaksanakan, menerapkan prioritas anggaran sehingga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terwujud.
Gugyh Susandy (2016)	Reformasi Manajemen Keuangan Daerah	Mengetahui sistem manajemen keuangan daerah	Tinjauan literatur.	Di era reformasi ini dimana penyelenggaraan otonomi daerah	Dengan pengimplementasian reformasi ditujukan untuk memajukan

	Suatu Pengantar	yang dipraktikkan pemerintah dengan prinsip <i>good governance</i> dalam manajemen keuangan daerah.		dan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi era global.	potensi daerah dalam menghadapi tantangan di era global.
Ati Rosliyati (2016)	Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan Sistem Informasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Implikasinya pada Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah.	Mengetahui dan mengkaji pengaruh reformasi keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, sistem informasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah serta implikasinya pada kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Priangan Timur.	<i>Descriptive survey and explanatory survey</i>	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh reformasi keuangan, tata kelola pemerintah, dan sistem informasi keuangan baik itu secara parsial maupun simultan.	Reformasi anggaran keuangan daerah pada pengimplementasiannya akan memberikan pengaruh terhadap aspek pengelolaan keuangan daerah.
Hendra Wijayanto (2015)	Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan <i>E-Budgeting</i>	Melakukan pengkajian terkait implementasi transparansi dalam APBD khususnya dalam <i>e-budgeting</i> sesuai prinsip <i>good governance</i> .	Studi literatur.	Tingkat transparansi dalam penggunaan <i>e-budgeting</i> berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah.	Reformasi anggaran dapat diimplementasikan dalam bentuk <i>e-budgeting</i> yang meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
Ika Puspita Jayanti, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Abdul Wachid (2014)	Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)	Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Pemerintah Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.	Kualitatif deskriptif.	Pemerintah Kota Malang menekankan penyusunan anggaran berbasis kinerja, penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penetapan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP), dan standar pelayanan publik. Faktor yang menghambat ialah kurangnya kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung.	Pada era reformasi sumber daya manusia, perangkat pendukung, dan komitmen organisasi merupakan hal yang perlu diperhatikan agar laporan keuangan yang bersifat transparan, berkualitas, dan akuntabel dapat diwujudkan.

Pembahasan

Pada era pasca reformasi ini, dalam pengelolaan anggaran daerah diwajibkan untuk bersifat transparan dan akuntabel. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan dapat dikelola dengan kualitas baik oleh Pemerintah Daerah agar kesejahteraan warga negara dapat dicapai. Peningkatan kesejahteraan dapat dicapai salah satunya melalui komitmen Pemerintah Daerah dalam melaporkan keuangan yang menyediakan berbagai informasi relevan dan aktual.

Dengan mengimplementasikan sistem anggaran dan akuntansi yang transparansi, akuntabilitas, dan aktual diharapkan dapat memberikan penjelasan dan deskripsi yang spesifik, informatif, dan aktual. Selain itu, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan warga negara dilakukan proses evaluasi yang dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan sinergi bersama pemerintah untuk menciptakan anggaran daerah yang berkualitas dan tepat guna.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan berbasis publik pada dasarnya terdiri dari beberapa aspek yang meliputi aspek penganggaran, akuntansi, pengendalian, dan audit. Adanya struktur anggaran yang baru diharapkan dapat berdampak terhadap penggambaran surplus serta defisit anggaran dengan jelas. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat memberikan solusi strategi jika mengalami defisit fiskal. Dengan

adanya reformasi anggaran dapat menciptakan format APBD yang lebih mudah dalam pembuatan perhitungan dana perimbangan yang tentunya menjadi bagian dari otonomi daerah. Dengan demikian, publik akan lebih mudah untuk melakukan analisis, evaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan APBD. Selain itu, sistem akuntansi keuangan dalam masa reformasi menerapkan prinsip akrual yang diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang spesifik, lengkap, informatif terkait pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang telah mengalami reformasi juga mampu memberikan peluang bagi semua lapisan untuk mengevaluasi hasil kinerja pemerintah.

Perlu dilakukan penyesuaian terhadap kemampuan, sumber daya manusia, sistem, dan kesiapan daerah terkait penerapan anggaran dan akuntansi keuangan pasca reformasi, sehingga visi peningkatan kesejahteraan dan perbaikan tata kelola pemerintah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeti, B. A., & Christiani, C. (2022). Reformasi Administrasi Dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 40–48.
- Anwar, M. I., Ismail, I., & Saggaf, S. (2020). Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Aset Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Bone. *Public Administration*, 1(1), 72–78.
[Http://Ojs.Lppmuniprima.Org/Index.Php/Adanagau](http://Ojs.Lppmuniprima.Org/Index.Php/Adanagau)
- Citrayanti, S. A., & Yuhertiana, I. (2021). Telaah Reformasi Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia: Perspektif Luder Contingency Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 12(2), 95–111.
<https://doi.org/10.36982/jiegmk.V12i2.1428>
- Djalante, A. (2022). Konstruksi Implementasi Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Pasca Reformasi Pemerintahan: Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah *SEIKO: Journal Of Management & Business*, 5(28), 685–697.
<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/1950%0Ahttps://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/download/1950/1285>
- Gustavo Puluala, M. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(1), 1–9.
<https://doi.org/10.36418/sostech.V1i1.5>
- Jayanti, I. P. (2014). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Pemerintahan Kota Malang). *Universitas Brawijaya*.
- Juanda, B., & Heriwibowo, D. (2016). Konsolidasi Desentralisasi Fiskal Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 15.
<https://doi.org/10.22212/jekp.V7i1.419>
- Kaligis, S., Korompis, S. N., & Maradesa, C. (2020). Akuntansi Pemerintah Daerah, Konsep Dan Aplikasi. *POLIMDO PRESS*, 280.
- Larasati, E. (2015). Paradigma Baru Keuangan Negara Dan Ruang Lingkupnya. *Modul Keuangan Publik*, 1–37.
- Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 233–242.
- Noviastuti, N. I. (2007). Reformasi Sistem Penganggaran Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung). *Universitas Brawijaya*.
- Priharjanto, A., & Hadiwibowo, Y. (2021). Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Dan Peran Pkn Stan. *Jurnal Info Artha*, 5(2), 108–117.
- RI, K. (2020). Modul Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah (Akuntansi Keuangan Daerah).

- Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Rosliyati, A. (2016). Reformasi Keuangan Daerah, Tata Kelola Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 127–135. <https://doi.org/10.56457/jimk.v4i2.33>
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi Dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.62>
- Savira, A. P. W., & Yuhertina, I. (2021). Kesiapan Dan Keberhasilan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Reformasi Akuntansi Dan Penerapan PP No. 71 Tahun 2010: Berdasarkan Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 39–49. <https://doi.org/10.47747/jbm.v2i2.229>
- Setiawan, W. D. (2020). Reformasi Birokrasi Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis ...*, 2(6), 297–304. <http://jwk.bandung.lan.go.id/Ojs/Index.php/jwk/Article/Vi>
- ew/392
- Suryanto. (2018). Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(2), 179–197. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i2.1140>
- Susandy, G. (2016). Reformasi Manajemen Keuangan Daerah Suatu Pengantar. *E-Journal STIE Sutaatmadja*, 41–64. [http://ejournal.stiesa.ac.id/File.php?File=Jurnal&Id=4&Cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&Name=03 Gugyh.Pdf](http://ejournal.stiesa.ac.id/File.php?File=Jurnal&Id=4&Cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&Name=03%20Gugyh.Pdf)
- Ulhaq, Dr. Z. S. (2018). Panduan Penulisan Skripsi: Literatur Review. *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical*, 44(8), 32.
- Widyastuti, T. D. (2022). REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Prosiding Working Papers Series In Management*, 14(1), 277–311.
- Wijayanto, H. (2015). TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) MELALUI PENERAPAN E-BUDGETING (Dalam Perspektif Teori Good Governance). *IJPA-The Indonesian Journal Of Public Administration*, 1(1), 72–88.